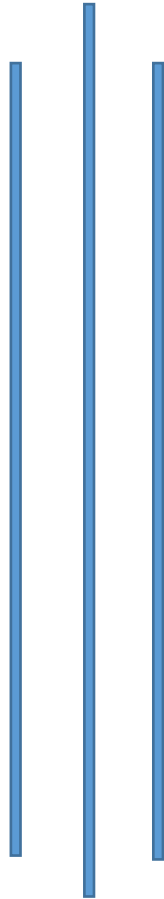




PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKHIR SEMESTER



TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	7
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	113
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING	14
3.1 Entitas Akuntansi Masing-Masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Menggunakan Basis AkruaI pada Pemerintah Daerah.....	20
BAB IV PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN.....	25
4.1 Pos pos Laporan Realisasi Anggaran	25
4.2 Pos-Pos Neraca.....	27
4.3 Kewajiban.....	30
4.4 Pos-pos Laporan Operasional.....	30
4.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
BAB V PENUTUP	32

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (*outcome*). Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Walikota selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 disusun secara lengkap dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Per Undang-Undangan yang berlaku. Dengan berlandaskan semangat **KEREN (Kolaboratif, Efektif, Responsif, Efisien dan Akuntabel)** mendorong terbentuknya keinginan untuk selalu menjalin sinergitas antar unsur demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Laporan Keuangan ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengenai perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah ;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi ;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhap anggarannya ;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entis akuntansi mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya ;
- e. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya ;
- f. Menyediakan informasi keuangan secara konprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana ;
- g. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar menyediakan informasi mengenai belanja, aset & kewajiban beban serta ekuitas dana.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 184 Ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- p. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Denpasar;
- s. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 80 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 81 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar
- u. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Adapun sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi Yang Penting

- 3.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.1 Belanja
 - 4.1.2 SILPA
- 4.2 Pos-pos Neraca
 - 4.2.1 Aset
 - 4.2.2 Aset Tetap
 - 4.2.3 Aset Lainnya
- 4.3 Kewajiban
 - 4.3.1 Ekuitas
- 4.4 Pos-pos Laporan Operasional

4.4.1 Beban

4.4.2 Surplus (Defisit) – LO

4.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.5.1 Ekuitas Awal

4.5.2 Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan

4.5.3 Ekuitas Akhir

Bab V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.647.329.765,00 atau 76,61% dari anggaran yang telah tersedia sebesar Rp. 19.120.173.352,00. Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar TA.2024

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
2	Belanja	19.120.173.352	14.647.329.765	4,472,843,587	76,61
2.1	Blj. Operasi	19.120.173.352	14.647.329.765	4,472,843,587	76,61
2.1.1	Blj. Pegawai	8.050.343.663	5.767.929.711	2,282,413,952	71,65
2.1.2	Blj.Brg & Jasa	9.423.788.689	7.460.701.594	1,963,087,095	79,17
2.1.5	Belanja Hibah	575.000.000	575.000.000	-	100
2.2	Blj.Modal	1.071.041.000	843.698.460	227,342,540	78,77
	Suplus/(Defisit)	(19,120,173,352)	(14,647,329,765)	(4,472,843,587)	(76,61)

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2024, diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp. 19.120.173.352,00 terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 8.050.343.633,00, belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.423.788.689,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.071.041.000,00. Menyikapi Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2024 tersebut, beberapa strategi yang telah di tempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Antara Lain :

- a. Belanja Daerah disusun berdasarkan skala prioritas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat ;
- b. Belanja Daerah pada tiap kegiatan diupayakan dengan tolak ukur dan target kinerjanya dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi ;
- c. Belanja Daerah dilaksanakan sesuai program, kegiatan yang telah ditetapkan ;
- d. Belanja Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran kinerja.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pladfon Anggaran yang telah disepakati, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mempunyai 5 program yang terdiri dari 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Belanja Langsung

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik

- Layanan Hubungan Media
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral :
- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar menurut kegiatan dapat diproyeksikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas
Komunikasi, Informasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2024 (Menurut Kegiatan)

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
	Belanja	19.120.173.352	14.647.329.765	76,61
A	Belanja Langsung	19.120.173.352	14.647.329.765	76,61
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.050.343.663	5.767.929.711	71,64
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.684.051.784	4.243.761.930	90,60
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	157.107.468	130.977.480	82,46
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.128.150	38.827.100	73,67
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.500.000	116.149.960	74,22
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	517.791.836	452.614.550	84,96
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.017.451	165.769.400	85,88
8	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	150.750.000	145.950.000	96,82
9	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	366.576.000	253.680.436	69,20
10	Layanan Hubungan Media	22.350.000	16.920.000	75,70
11	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	398.921.000	397.775.000	99,71
12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	41.150.000	35.600.000	86,51
13	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.982.895.000	2.165.183.998	72,59
14	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	360.491.000	257.101.500	71,32
15	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	274.000.000	181.550.000	66,26

	Elektronik			
16	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	107.200.000	56.570.000	52,77
17	Membangun Metadata Statistik Sektoral	64.625.000	63.612.200	98,43
18	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	362.525.000	85.080.000	23,47
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	51.350.000	50.926.500	99,17
20	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	130.400.000	21.350.000	16,37
	Total	19.120.173.352	14.647.329.765	76,61

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program Tahun Anggaran 2024 serta dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan skala prioritas dalam pembelanjaan daerah. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah mencapai **76.61 %**. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Tahun Anggaran 2024 sudah mencapai target.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

3.1 Entitas Akuntansi Masing-Masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Adapun entitas atau pos-pos dalam laporan keuangan berdasarkan panduan penyusunan BAS untuk pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pemdagri 64/2013 sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terklasifikasi sebagai dinas non pendapatan adapun contoh klasifikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun
4.0.0.00.00	PENDAPATAN – LRA
4.1.0.00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA
4.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah – LRA
4.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA
4.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA
4.1.4.00.00	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA
4.2.0.00.00	PENDAPATAN TRANSFER-LRA
4.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan – LRA
4.2.2.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya –LRA
4.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya –LRA
4.2.4.00.00	Bantuan Keuangan – LRA
4.3.0.00.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH –LRA
4.3.1.00.00	Pendapatan Hibah – LRA
4.3.2.00.00	Dana Darurat – LRA
4.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya – LRA

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Akun Belanja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun
5.0.0.00.00	BELANJA
5.1.0.00.00	BELANJA OPERASI
5.1.1.00.00	Belanja Pegawai
5.1.2.00.00	Belanja Barang dan Jasa
5.1.3.00.00	Belanja Bunga
5.1.4.00.00	Belanja Subsidi
5.1.5.00.00	Belanja Hibah
5.1.6.00.00	Belanja Bantuan Sosial
5.2.0.00.00	BELANJA MODAL
5.2.1.00.00	Belanja Modal Tanah
5.2.2.00.00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.3.00.00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.4.00.00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.5.00.00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.3.0.00.00	BELANJA TAK TERDUGA
5.3.1.00.00	Belanja Tak Terduga

c. Pendapatan-LO

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terklasifikasi sebagai dinas non pendapatan. Adapun contoh klasifikasi Akun Pendapatan LO sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun
8.0.0.00.00	PENDAPATAN – LO
8.1.0.00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO
8.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah – LO
8.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah – LO
8.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
8.1.4.00.00	Lain-lain PAD Yang Sah – LO
8.2.0.00.00	PENDAPATAN TRANSFER – LO
8.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO
8.2.2.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO
8.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
8.2.4.00.00	Bantuan Keuangan – LO
8.3.0.00.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO
8.3.1.00.00	Pendapatan Hibah – LO
8.3.2.00.00	Dana Darurat – LO
8.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya – LO
8.4.0.00.00	SURPLUS NON OPERASIONAL – LO
8.4.1.00.00	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
8.4.2.00.00	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
8.4.3.00.00	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
8.5.0.00.00	PENDAPATAN LUAR BIASA – LO
8.5.1.00.00	Pendapatan Luar Biasa – LO

d. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi Akun Beban sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun
9.0.0.00.00	BEBAN
9.1.0.00.00	BEBAN OPERASI – LO
9.1.1.00.00	Beban Pegawai – LO
9.1.2.00.00	Beban Barang dan Jasa
9.1.3.00.00	Beban Bunga
9.1.4.00.00	Beban Subsidi
9.1.5.00.00	Beban Hibah
9.1.6.00.00	Beban Bantuan Sosial
9.1.7.00.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.8.00.00	Beban Penyisihan Piutang
9.1.9.00.00	Beban Lain-lain.
9.2.0.00.00	BEBAN TRANSFER
9.2.1.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.2.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.3.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9.2.4.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.5.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9.2.6.00.00	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9.3.0.00.00	DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1.00.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO
9.3.2.00.00	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
9.3.3.00.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

e. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Klasifikasi akun aset dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode Akun	Nama Akun
1.0.0.00.00	Aset
1.1.0.00.00	Aset Lancar
1.1.1.00.00	Kas dan Setara Kas
1.1.2.00.00	Investasi Jangka Pendek
1.1.3.00.00	Piutang Pendapatan
1.1.4.00.00	Piutang Lainnya
1.1.5.00.00	Penyisihan Piutang
1.1.6.00.00	Beban Dibayar Dimuka
1.1.7.00.00	Persediaan
1.1.8.00.00	Aset Untuk Dikonsolidasikan
1.2.0.00.00	Investasi Jangka Panjang
1.2.1.00.00	Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1.2.2.00.00	Investasi Jangka Panjang Permanen
1.3.0.00.00	Aset Tetap
1.3.1.00.00	Tanah
1.3.2.00.00	Peralatan dan Mesin
1.3.3.00.00	Gedung dan Bangunan
1.3.4.00.00	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1.3.5.00.00	Aset Tetap Lainnya
1.3.6.00.00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.7.00.00	Akumulasi Penyusutan
1.4.0.00.00	Dana Cadangan
1.4.1.00.00	Dana Cadangan

f. Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Adapun klasifikasi dari akun Kewajiban sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Kode Akun	Nama Akun
2.0.0.00.00	Kewajiban
2.1.0.00.00	Kewajiban Jangka Pendek.
2.1.1.00.00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.2.00.00	Utang Bunga
2.1.3.00.00	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4.00.00	Pendapatan Diterima Dimuka.
2.1.5.00.00	Utang Beban
2.1.6.00.00	Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2.0.00.00	Kewajiban Jangka Panjang
2.2.1.00.00	Utang Dalam Negeri
2.2.2.00.00	Utang Jangka Panjang Lainnya

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Adapun klasifikasi Akun Ekuitas sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun
3.0.0.00.00	Ekuitas
3.1.0.00.00	Ekuitas
3.1.1.00.00	Ekuitas
3.1.2.00.00	Ekuitas SAL
3.1.3.00.00	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah Basis Akrual, yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Adapun pengakuan pos-pos entitas akuntansi meliputi;

- a. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar ;
- b. Entitas akuntansi pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ;
- c. Laporan Keuangan terdiri dari :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2) Neraca
 - 3) Laporan Operasional (LO)
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan. (CaLK)
- d. Laporan Keuangan yang disajikan dalam Rupiah, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dan dengan konsep biaya historis.
- e. Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas.
- f. Periode akuntansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

3.2.1 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Adapun pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah meliputi;

a. Beban dan Belanja

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas umum daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

b. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

c. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik. Metode perpetual, dimana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Sedangkan metode periodik, untuk mengetahui jumlah persediaan akhir dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Metode yang dipakai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Kota Denpasar.

d. Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

e. Konstruksi dalam pekerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

f. Aset lainnya (Aset Tidak Berwujud)

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan.

3.2.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Ringkasan Penerapan Kebijakan Akun yang Penting Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Sesuai Dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib di pertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Kota Denpasar tidak terdapat setara kas.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan, yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, irigasi dan jaringan
- Aset tetap lainnya
- Kontruksi dalam pengerjaan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud ;

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan.
- Merupakan obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya untuk dipelihara.
- Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya menjadi kewenangan OPD meliputi aset tak berwujud dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena rusak berat, Usang, atau karena sedang menunggu Proses Pemindah tangganan direklasifikasi kedalam aset lain-lain.

e. Belanja dan Beban

Dalam laporan realisasi anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja. Sedangkan laporan operasi (LO) menyebutnya dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban
- Terjadinya konsumsi aset
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa
- Belanja diakui pada saat:
- Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan atau diterimanya SPJ fungsional oleh BUD.

BAB IV PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah.

Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Anggaran Kerja.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 19.120.173.352,00 realisasi sebesar Rp. 14.647.329.765,00 atau mencapai 76.61%.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, dan Belanja Barang Jasa. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Hibah. Sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja gedung bangunan, belanja jalan/irigasi/jaringan dan aset tidak berwujud

Dalam Tahun Anggaran 2024 terdapat anggaran sebesar Rp. 8.050.343.663,00 untuk Belanja Pegawai dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.5.767.929.711,00 atau mencapai 71,65 %, terdapat anggaran sebesar Rp. 9.423.788.689,00 untuk Belanja Barang Jasa dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.7.460.701.594,00 atau mencapai 79,17%, dan terdapat anggaran sebesar Rp.

575.000.000,00 untuk Belanja Hibah dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 575.000.000,00 atau mencapai 100%. Adapun tercantum dalam tabel sebagai berikut;

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
BELANJA OPERASI	18,049,132,352	13,803,631,305	76,48	12.390.456.617
Belanja Pegawai	8.050.343.663	5.767.929.711	71,65	4.445.404.071
Belanja Barang dan Jasa	9.423.788.689	7.460.701.594	79,17	7.945.052.546
Belanja Hibah	575.000.000	575.000.000	100	-

b. Belanja Modal

Belanja modal dengan anggaran Rp. 1.071.041.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 843.698.460,00 atau mencapai 78,77 %.

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
BELANJA MODAL	1.071.041.000	843.698.460	78,77	487.277.300
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.071.041.000	843.698.460	78,77	487.277.300
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

4.1.2 SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Adapun SILPA dalam Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp. 4.472.843.587), dengan Jumlah Saldo Anggaran sebesar Rp.19.120.173.352,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 14.647.329.765,00.

4.2 Pos-Pos Neraca

4.2.1 Aset.

Ringkasan Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut;

Kas di Kas daerah	Rp. -
Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp. -
Persediaan	Rp. 28.605.400
Yang terdiri dari :	
- ATK	Rp. 6.405.500
- Alat listrik dan alat elektronik	Rp. 267.000
- Materai	Rp. 2.600.000
- Perabot Kantor	Rp. 4.848.500
- Suku Cadang	Rp. -
- Bahan Bakar Minyak	Rp. -
- Bahan Kantor Lainnya	Rp. 575.400
- Cetakan	Rp. 1.544.400
- Souvenir/Plakat	Rp. 3.960.000
- Bahan Komputer	Rp. 8.405.000
- Pakaian Olahraga	Rp. -

4.2.2 Aset Tetap.

Ringkasan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut;

1. Tanah	Rp. -
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 24.131.773.856,13
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 82.060.000,00
4. Jalan,Irigasi,dan Jaringan	Rp. 974.559.665,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp. 43.946.650,00

6. Akumulasi Aset Tetap	Rp. (22.721.126.711,13)
Jumlah Aset Tetap	Rp. 2.511.213.460,00

4.2.3 Aset Lainnya.

1. Akumulasi Penyusutan	
Aset Lain-lain	Rp. (1.259.278.461,66)
2. Aset Tak Berwujud	Rp. 922.914.900,00
3. Akumulasi Amortisasi	Rp. (1.808.701.730,00)
4. Aset Lain-Lain	Rp. 1.259.278.461,66
5. Amortisasi ATB	Rp. (913.765.650,00)
Jumlah Aset Lainnya	Rp. 9.149.250,00

Jumlah Aset adalah **Rp. 2.548.968.110,00**.

1. Tanah

Merupakan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 31 Desember 2024.

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Rp	-

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2024 yang terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, dan Peralatan kantor lainnya. Rincian perhitungan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	989.402.403.834,91
- Belanja Modal	Rp	172.301.850.123,00
-Mutasi Masuk Aset Peralatan dan Mesin ke Dinas BPKAD	Rp	60.826.451.974,24
- Mutasi Keluar Aset Peralatan dan Mesin ke Dinas BPKAD	Rp	76.929.874.191,48
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	1.145.600.831.740,67

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan milik Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar antara lain, terdiri dari bangunan gedung kantor lainnya. Rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	82.060.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Rp	82.060.000,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Merupakan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2024 yang terdiri dari instalasi dan jaringan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	974.559.665,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Rp	974.559.665,00

5. Aset Tetap Lainnya

Merupakan Aset Tetap lain yang dimiliki Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2024 yang terdiri dari buku/barang perpustakaan, barang bercorak seni budaya dan olah

raga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	43.946.650,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Rp	43.946.650,00

6. Aset –Aset Lainnya

Merupakan Aset Lain-Lain yang dimiliki Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2024 berupa Aset Tak Berwujud berupa software senilai Rp.922.914.900,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut;

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	922.914.900,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Rp	922.914.900,00

4.3 Kewajiban

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki Kewajiban/Hutang yang belum terbayarkan pada Tahun Anggaran 2024 total sebesar Rp.2.324.577 yaitu Hutang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar **Rp.335.000**, Hutang Telepon sebesar **Rp.121.969**, Hutang Listrik sebesar **Rp.1.867.608**, dalam hal ini Hutang tersebut akan dibayarkan pada Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2024.

4.3.1 Ekuitas

Ekuitas dalam neraca Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 disajikan senilai **Rp. 2.546.643.533,00** yang merupakan perhitungan antara jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebesar Rp.2.548.968.110, yang dikurangi dengan kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang meningkat sebesar Rp.2.324.577.000.

4.4 Pos-pos Laporan Operasional

4.4.1 Beban

Jumlah Beban dalam Laporan Operasional tahun 2024 tersaji senilai Rp. 14.509.712.111,00, terdiri dari Beban Operasi meliputi dari Beban Pegawai Rp. 5.767.929.711,00 dan Beban Barang Jasa sebesar 7.471.824.071,00. Terdapat Beban Penyusutan sebesar Rp.678.197.409 dan Beban Amortisasi senilai Rp. 16.760.920,00.

4.4.2 Surplus (Defisit)-LO

Dari jumlah Beban tahun 2024 sebesar Rp. 14.509.712.111,00 terdapat Defisit sebesar (Rp. 14.509.712.111,00)

4.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.5.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2024 sebesar Rp. 2.361.365.870,00 merupakan Ekuitas akhir tahun 2023.

4.5.2 Perubahan Ekuitas

Dilihat dari jumlah Ekuitas awal dan Ekuitas akhir tahun 2024, terdapat perubahan ekuitas sebesar Rp. 185.277.663,00.

4.5.3 Ekuitas Akhir

Besarnya Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.546.643.533,00.

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan secara keseluruhan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) . Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, surplus/defisit, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam tahun anggaran 2024, Anggaran belanja sebesar Rp. 19.120.173.352,00, terealisasi sebesar Rp. 14.647.329.765,00 Atau mencapai 76,61 %. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.472.843.587,00
- Neraca menyajikan informasi posisi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024. Jumlah aset sebesar Rp. 2.548.968.110,00, sedangkan Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 2.324.577,00 dan Jumlah Ekuitas Sebesar Rp. 2.546.643.533,00.
- Laporan Operasional (LO), menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang tercemin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam tahun anggaran 2024 jumlah Beban sebesar Rp. 14.509.712.111,00, sehingga terdapat defisit-LO sebesar (Rp. 14.509.712.111,00). Sedangkan dalam Tahun 2023, jumlah beban sebesar Rp. 13.186.762.732,00 terdapat defisit sebesar (Rp. 13.186.762.732,00). Jika dibandingkan dengan Jumlah beban tahun 2023, pada Tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah beban sebesar Rp. 1.322.949.379,00 atau 9,12 %. Kenaikan jumlah beban tersebut disebabkan karena adanya Kenaikan nilai penyusutan aset pada Tahun Anggaran 2024, hal ini secara langsung mempengaruhi Aset dan Penyusutan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO dan Ekuitas Akhir. Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp. 2.361.365.879,00, sedangkan Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 2.546.643.533,00. Sehingga terdapat perubahan ekuitas sebesar Rp. 185.277.654,00.
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terincian atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam rangka pengungkapan yang memandai.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2024 yang dapat kami jelaskan dengan sebenarnya.

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, M.Si
NIP. 19780128 199612 1 003

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Berita acara Penutupan Kas, Rekening Koran per 31 Desember 2023 dan Buku kas Umum per 31 Desember 2024
2. Lampiran 2 : Data Persediaan per 31 Desember 2024
3. Lampiran 3 : Data Aset tetap per 31 Desember 2024
4. Lampiran 4 : Data Penyusutan
5. Lampiran 5 : Data Kewajiban / Hutang